



KONTRAK PENGGUNAAN LAPAK Validasi Data PKL Teras Malioboro 2

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya yang memiliki kewenangan terhadap Teras Malioboro 2 kini tengah melakukan proses validasi data pedagang kaki lima (PKL). Hal ini berkaitan dengan keperluan penerbitan kontrak penggunaan lapak di lokasi tersebut.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Ekwanto, kontrak penggunaan lahan akan menguatkan legalitas pedagang. Selain itu pedagang juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi lapak. "Kegiatan validasi atau pendataan dilakukan mulai September dan mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Kami sudah membuat tim untuk pendataan," jelasnya, belum lama ini.

Sebelumnya sosialisasi terkait rencana validasi tersebut sudah dilakukan kepada perwakilan pedagang yang diwakili oleh ketua lorong dan perwakilan kelompok atau paguyuban pedagang di Teras Malioboro 2. Dalam melakukan validasi data, pihaknya tetap mengacu pada data awal terkait jumlah pedagang dan lokasi lapak

yang ditempati sesuai hasil undian di Teras Malioboro 2.

Ekwanto menjelaskan, berdasarkan data jumlah pedagang yang menempati Teras Malioboro 2 adalah 1.041 pedagang. "Validasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan data pedagang yang memanfaatkan lapak atau tidak. Data ini penting sebagai dasar untuk penandatanganan kontrak penggunaan lapak," imbuhnya.

Dalam kontrak yang akan diterbitkan, dirinya memastikan akan ada pasal-pasal yang mengatur terkait hak dan kewajiban pedagang. Terutama saat menempati lapak hingga sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran. Apalagi lapak yang ditempati pedagang di Teras Malioboro 2 adalah fasilitas milik pemerintah sehingga tidak bisa dijual belikan atau dialihkan secara sepihak. Kontrak tersebut akan berlaku selama dua tahun dan bisa diperpanjang.

Sementara Ketua Paguyuban Tri Darma Rudiarto, mengaku sudah mengetahui rencana validasi data

pedagang di Teras Malioboro 2. "Saya kira, teman-teman pedagang tidak akan keberatan dengan validasi tersebut. Memang ada beberapa pedagang yang tidak berjualan di lapak sesuai hasil undian karena bertukar tempat secara sukarela dengan pedagang lain," katanya.

Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal, di antaranya ingin menggabungkan lapak supaya memiliki luasan yang lebih besar dan lebih mudah saat menunggu lapak. "Misalnya saat menjadi PKL Malioboro, ada dua lapak milik ayah dan anak yang bersisian. Saat direlokasi, lokasinya saling berjauhan. Makanya bertukar tempat secara sukarela dengan pedagang lain," tambahnya.

Selain itu, dimungkinkan ada pula pedagang yang dulunya tercatat berjualan batik tetapi saat ini mengalihkan jenis dagangannya menjadi makanan. Oleh karena itu memang perlu ada validasi ulang agar lebih valid sebelum kontrak penggunaan lapak ditandatangani antara PKL dengan pemerintah. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005